

BAB IV

PERJUANGAN HAJI AGUS SALIM DALAM DIPLOMASI INDONESIA

Bab *empat*, berisi tentang pemaparan dari upaya Haji Agus Salim dalam berjuang mendapatkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dalam melakukan perundingan dengan pihak Belanda, negara Arab maupun forum internasional. Perjuangan ini dilakukan dalam mewujudkan misi sebagai negara yang merdeka dan diakui eksistensinya oleh negara lain, sehingga terwujudnya kemerdekaan sesungguhnya.

Sebagai tokoh perjuangan, ia punya kadar kualitas yang sulit dicariandingannya. Terutama kecerdasannya, barangkali termasuk jenius. Perpaduan ketajaman ilmu Agama, ilmu Politik, Kemampuan Bahasa asing dan kecerdasannya yang tinggi membuatnya menjadi pribadi yang disegani. Atas kemahirannya dalam berdiplomasi dan penguasaannya atas berbagai bahasa asing, Bung Karno pun jatuh hati dan senantiasa diandalkan sebelum kemerdekaan hingga pada masa awal kemerdekaan untuk berdiri atas nama bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional.

A. Awal Karir Diplomatik Haji Agus Salim

Haji Agus Salim merupakan seorang tokoh politik yang sangat cemerlang dalam kehidupannya, sejak kecil beliau telah terdidik dengan dunia luar dan banyak bergaul dengan orang Belanda dan dunia internasional. Sebelum kemerdekaan, ia memiliki pengalaman yang luar biasa dengan menghabiskan 5 tahun bekerja dalam pemerintahan Belanda. Ketika mulai aktif dalam pergerakan nasional, ia dicurigai menjadi mata-mata karena pernah bekerja pada pemerintah Belanda. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa Agus Salim adalah seorang yang anti-nasionalisme. Perjuangannya dalam mempersiapkan kemerdekaan bangsa kita adalah bukti bahwa dia adalah seorang yang berjiwa nasionalisme.

1. Pergerakan Haji Agus Salim Sebelum Kemerdekaan

Menurut catatan sejarah bangsa Indonesia, sejak dahulu sampai sekarang, nama-nama dari para pemimpin, pemikir, pejuang yang terkenal jumlahnya cukup besar di Indonesia, antara lain: Imam Bonjol, Teuku Umar, Diponegoro, dan lain-lain yang tampil sebagai tokoh jauh sebelum pergerakan Belanda. Yang dilakukannya, menunjukkan bahwa kesadaran untuk mengubah keadaan menuju yang lebih baik bagi kehidupan masa depan bangsanya telah ada sejak akhir abad ke 19.⁶⁹ Demikian juga nama-nama seperti, Haji Agus Salim, HOS Cokroaminoto, Tan Malaka, Sutan Syahrir, Soekarno dan lain-lainnya adalah sederatan nama yang pernah hadir dan mengisi sejarah bangsa Indonesia di awal abad ke 20, yang dikenal sebagai awal dari periode pergerakan nasional. Tokoh-tokoh tersebut sekaligus sebagai generasi yang menjadi cikal bakal adanya berbagai corak ideologi yang mewarnai sejarah perjuangan bangsa Indonesia.⁷⁰

Selama dasawarsa pertama abad ke-20 terjadi gerakan pembaharuan di Hindia-Belanda khususnya dikalangan umat Islam. Proses ini ditandai dengan berdirinya sejumlah organisasi terutama di Pulau Jawa. Organisasi-organisasi tersebut adalah Sarekat Dagang Islam (1909) yang kemudian menjadi Sarekat Islam pada tahun (1911), Muhammadiyah (1912), dan Nahdlatul Ulama (1926). Kemudian beberapa organisasi muncul juga di Pulau Sumatera. Gejala-gejala pembaharuan ini bersumber pada pergeseran sosial atas bangsa Indonesia dan umat Islam pada khususnya. Gerakan modernisasi ini tentunya memiliki latar belakang yang bersifat internal maupun karena pengaruh dari luar. Faktor intern yang dimaksud adalah praktek-praktek agama dengan ajaran diluar Islam

⁶⁹Abdurrachman Surjomihardjo, *“Pola-Pola Pemikiran Menuju Kemerdekaan Indonesia”*, (Jakarta: Prisma, 1976), Hlm. 17.

⁷⁰Daniel Dhakidae, *“Ideologi”*, (Jakarta: Prisma, 1979), Hlm. 3.

dan tekanan dari pihak Barat yang berusaha membuka jalan bagi agama Kristen. Faktor eksternalnya adalah datangnya pengaruh kebangkitan Islam di negara-negara lain.⁷¹

Perjuangan Agus Salim berlangsung selama tiga zaman : zaman Belanda, zaman Jepang dan pada masa kemerdekaan. Merupakan rentetan perjuangan yang mempunyai pengaruh besar sekali bagi bangsa dan Negara. Sahamnya dalam pergerakan pembaharuan dan kebangkitan Islam diakui secara luas. Adapun cara-cara penyebaran cita-cita perjuangannya, dilakukan melalui berbagai media seperti saluran organisasi dan surat kabar, sementara kemampuannya sebagai orator tersalur melalui pidato, ceramah, khotbah jumat dan parlemen. Setelah melewati masa sekolah, ia bekerja sebagai penerjemah, kemudian menjadi pembantu notaris di RIAU. Pada tahun 1905 bekerja pada kongsi mencari arang batu di Reteh Indragiri sampai tahun 1906. Lalu, sejak 1906 hingga tahun 1911 Agus Salim bekerja di konsulat Belanda di Jeddah. Selama lima tahun di tanah Arab inilah, beliau mempelajari juga agama Islam dan menunaikan ibadah Haji.⁷² Langka saat itu bagi tokoh-tokoh pergerakan yang telah menunaikan ibadah Haji dan untuk lebih menghormati usia beliau yang lebih tua, maka pada saat itu ia lebih dikenal dengan sebutan Haji Agus Salim.

Sekembalinya beliau dari Jeddah membuatnya menetap di Jakarta. Kemudian beliau kembali ke kampung halaman, pada tahun 1912 Haji Agus Salim mendirikan Hollandsch Inlandsche School (HIS) atau sekolah dasar bumi putra di Koto Gadang, Sumatera Barat, yang diasuhnya sampai tahun 1915.⁷³ Di sekolah ini berlaku

⁷¹*Ibid.*, Hlm. 56

⁷² Solichin Salam, "*Hadji Agus Salim: Pahlawan Nasional*", (Jakarta: Djajamurni, 1963), Hlm. 36.

⁷³ Abdul Rahman, "*Peran Diplomasi Hadji Agus Salim Dalam Kemerdekaan Indonesia (1942-1954)*", (Titian: Jurnal Ilmu Humaniora Volume 2, No. 1, Juni 2018), hlm. 143.

aturan yang istimewa, anak-anak yang cerdas namun tidak mampu akan dibebaskan dari uang sekolah. Setelah hampir 3 tahun ia kembali dan menetap lagi di Jakarta. Di saat itu pula telah banyak bermunculan berbagai macam organisasi pergerakan sosial, politik, pendidikan dan lain-lainnya, Tetapi Agus Salim belum juga memasuki salah satu dari sekian banyak organisasi pergerakan yang ada. Oleh karena itu nama beliau belum lagi mencuat dan dikenal dalam dunia pergerakan politik maupun sosial lainnya.

Pada tahun 1915, Haji Agus Salim memasuki perkumpulan Sarekat Islam. Itu adalah pengalaman yang pertama dalam dunia politik. Sejarah perkembangan Sarekat Islam (SI) diawali dengan hadirnya Sarekat Dagang Islam di Jakarta atas rintisan Raden Mas Tirto Adisuryo, Syekh Ahmad Bajened juga mendirikan organisasi serupa di Bogor pada tahun 1911. Para pedagang batik di Solo ketika itu tertarik untuk mendirikannya juga karena terancam oleh orang-orang Cina. Tetapi akhirnya Haji Samanhudi sebagai pimpinannya membentuk sendiri Sarekat Islam. Adapun tujuan Sarekat Islam yaitu, untuk memajukan agama Islam dan perdagangan pribumi berdasarkan falsafah Islam.⁷⁴ Kemudian di Surabaya, HOS Tjokroaminoto yang ketika itu anggota perkumpulan Budi Utomo tertarik dengan organisasi baru itu. Ia melihat banyak perbedaan, terutama landasan agama yang begitu kuat yang tidak ada dalam Budi Utomo. Kepercayaan warga Sarekat Islam (SI) terhadap pribadi Tjokroaminoto yang mempesona menjadikannya pemimpin untuk memperjuangkan kemajuan Sarekat Islam (SI).

Kehadiran Sarekat Islam (SI) demikian cepat merebut hati rakyat, membuat organisasi lain merasa gentar. SI muncul di tengah-tengah bangsa Indonesia pada saat

⁷⁴ Sutrisno Kutoyo, "*Haji Agus Salim*", (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1986), Hlm. 23.

masyarakat sedang kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri. Dalam lapangan ekonomi, politik, dan agama, masyarakat sedang mengalami kemunduran. SI berhasil memberikan arah dan tujuan yang tegas kepada perjuangan rakyat Indonesia. SI mempunyai cita-cita kebangsaan yang bercorak Islam. Oleh karena itu, pada tahun 1917 diterbitkan *Harian Neraca*, *Harian* ini sangat berpengaruh di Indonesia. Melalui harian itu rakyat dapat mengetahui pergerakan kebangsaan untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Agus Salim sebagai pemimpinya juga menjadi pemimpin Redaksi Bahasa Melayu pada Komisi Bacaan Rakyat di Balai Pustaka, Jakarta. Agus Salim mempergunakan surat kabar ini sebaik-baiknya sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia. Dalam waktu yang pendek, SI berkembang dengan pesat. Pada tahun 1919, Haji Agus Salim menjadi ketua redaksi surat kabar *Bataviaasch Nieuwsblad* di Jakarta. Hal tersebut membuat Agus Salim semakin terkenal dan perjuangan SI semakin maju. Agus Salim tidak hanya memimpin partai dan surat kabar, tetapi juga memimpin Perserikatan Kaum Karyawan. Di tahun 1919, Agus Salim juga diangkat menjadi sekretaris persatuan kaum buruh. Hampir seluruh segi perjuangannya dimasuki oleh Agus Salim.⁷⁵

Pemerintah Belanda telah lama melihat bahwa Tjokroaminoto dan Sarekat Islamnya makin populer dikalangan rakyat. Namun, sikap pemerintah Hindia Belanda berusaha menghalang-halangi perkembangan SI karena dapat membahayakan kedudukan pemerintah Hindia Belanda. Mereka memerlukan seseorang yang memenuhi syarat untuk memata-matai tokoh Islam itu. Datuk Tumenggung, seorang pejabat Pemerintah Hindia-Belanda yang posisinya sebagai penasihat urusan bumi putera yang kebetulan teman baik Agus Salim mengusulkan namanya. Dengan bertambah dikenalnya

⁷⁵ *Ibid.*, Hlm. 24.

langkah-langkah yang ditempuh para pimpinan Sarekat Islam (SI) muncul pula berbagai tantangan dan fitnahan. Datuk Tumenggung mengatakan kepadanya bahwa polisi mendapat laporan tentang akan pecahnya pemberontakan di Jawa. Ada laporan bahwa Tjokroaminoto setuju menerima uang sebanyak 150.000 gulden dari pihak Jerman dan mendapat 40.000 pucuk senjata untuk memberontak terhadap penguasa Belanda apabila senjata-senjata itu diserahkan kepadanya.

Haji Agus Salim menyadari kontak pertama dengan Sarekat Islam memang aneh dan caranya mungkin agak merugikan namanya. Secara pribadi ia tidak mempercayai berita itu, karena adalah hal gila untuk memberikan senjata kepada orang-orang yang telah lebih dari seabad tak pernah memegang senjata dan menyuruhnya mengadakan pemberontakan, itu sama dengan melakukan bunuh diri. Bagaimanapun Agus Salim ingin mendekati Tjokroaminoto, terlepas dari tugasnya untuk menyelidiki gerak-gerik Tjokroaminoto dan pimpinan lainnya. Agus Salim yakin sejak semula Tjokroaminoto telah maklum, bahwa ia memang ada hubungan dengan pemerintah ketika itu. Namun, Tjokroaminoto mengajaknya menghadiri kongres Sarekat Islam pada tahun 1915 di Surabaya. Agus Salim masuk Sarekat Islam sebelum berlangsung kongres di Surabaya tahun 1915. Kesungguhan dan kemampuan yang ditopang oleh pribadi yang menarik, cerdas, pengetahuan luas serta berani, membuatnya dalam waktu singkat dipercayakan untuk menduduki salah satu kepengurusan dalam Central Sarekat Islam. Pengangkatan ini tertuang sebagai salah satu hasil keputusan kongres di Surabaya. Dengan demikian inilah Agus Salim menceburkan diri sepenuhnya dalam pergerakan rakyat.

Kehadiran Agus Salim merupakan usaha untuk melengkapi corak dan bentuk Sarekat Islam di bawah pimpinan Samanhudi yang berlatar belakang pengusaha yang taat beribadah, Tjokroaminoto yang progresif dan

pemberani, Abdul Muis yang terpelajar dan idealis, dilengkapi Agus Salim yang berpengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum yang luas, cerdas dan berkemampuan bahasa dan bicara yang tinggi. Mereka memiliki kesamaan menolak paham kiri yang oleh orang Belanda bernama Josephus Franciscus Marie Sneevliet disebarkan melalui wakil Sarekat Islam di Jawa Tengah seperti Darsono dan Semaun. Ketika berlangsung kongres ke-5 Sarekat Islam di Yogyakarta pada maret 1921, Agus Salim berhadapan dengan Semaun yang mau memasukkan paham komunisme ke dalam tubuh Sarekat Islam. Melalui perdebatan yang panjang dengan Semaun, Agus Salim menegaskan sikap organisasi hendaknya tetap berikhtiar mendidik rakyat mencari kesenangan dunia dan akhirat berdasar agama Islam. Sedangkan Semaun dan kawan-kawan tetap bersikeras agar azas komunis ikut mewarnai Sarekat Islam, karena pada dasarnya Sarekat Islam dan PKI memiliki kesamaan dalam perjuangan yaitu membela kepentingan rakyat kecil dan antikapitalisme. Dalam kongres Sarekat Islam di Surabaya pada oktober 1921, rencana Agus Salim diperkuat bersama Abdul Muis diterima secara bulat sehingga Sarekat Islam tetap berdasar Islam.

Kongres Sarekat Islam di Surabaya dan Yogyakarta merupakan tonggak yang berarti dalam perjalanan Sarekat Islam. Keikutsertaan Agus Salim dalam Sarekat Islam telah mampu mencapai beberapa keberhasilan, misalnya terlemparnya paham komunisme dari tubuh Sarekat Islam. Penegasan garis perjuangan, mencapai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai, serta meletakkan garis Islam secara tegas. Agus Salim selalu menekankan Islam sebagai dasar perjuangan bangsa Indonesia dan menekankan perlunya persatuan untuk berjuang bersama-sama menghapuskan segala kejahatan dalam perbudakan ekonomi dan politik. Jalan yang ditempuh Agus Salim untuk mengejar cita-cita perjuangan antara lain dengan cara menyebarkan gagasannya melalui berbagai surat kabar, mengajukan ide-

idenya melalui pidato diberbagai forum, radio serta media lainnya.

Pada tahun 1921 sampai dengan 1924, Agus Salim menjadi anggota Volksraad (dewan rakyat) sebagai wakil Serekat Islam. Di sini Agus Salim bukan hanya berjuang untuk SI, melainkan juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Dengan otaknya yang tajam dan kemahirannya berpidato, Agus Salim berusaha mempengaruhi pemimpin-pemimpin Indonesia lainnya supaya lebih giat berjuang untuk bangsa sendiri. Sesekali dalam rapat Volksraad Agus Salim berpidato dalam bahasa Melayu, tak ayal kemudian Ia ditegur ketua parlemen dan diminta berpidato dalam bahasa Belanda. Sebenarnya Agus Salim lancar berbicara dalam bahasa Belanda tapi ia adalah orang yang berpendirian kuat sehingga berpendapat bahwa tidak ada larangan penggunaan bahasa Melayu dalam rapat Volksraad.

Menjelang tibanya saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, Haji Agus Salim ditunjuk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang dibentuk pihak Jepang, di mana terhimpun tenaga-tenaga pemimpin pergerakan rakyat Indonesia. Badan itu diketuai oleh Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat, sedang ketua mudanya ialah R. Pandji Suroso dan Itibangase Yosio.⁷⁶ Sidang pertama khusus membahas dasar Negara. Pada sidang ini terdapat dua kelompok, disinalah mulai terjadi perdebatan ideologi. Kelompok pertama menghendaki dasar negara Islam, mereka menganggap Islam tidak dapat dipisahkan dari negara bahwa urusan kenegaraan pada pokoknya merupakan bagian integral risalah Islam. Sedangkan kelompok yang kedua menghendaki dasar negara kebangsaan, agar Indonesia dibangun berdasarkan kebangsaan tanpa kaitan khusus pada ideologi

⁷⁶Mukayat, "*Haji Agus Salim*", (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981), Hlm. 60-61.

keagamaan.⁷⁷ Dalam sidang kedua dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang ini dibagi dalam tiga panitia, yakni panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Ir. Soekarno, Panitia Pembela Tanah Air diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso dan panitia perekonomian serta keuangan yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta. Haji Agus Salim termasuk anggota yang bertugas merancang Undang-Undang Dasar di bawah pimpinan Ir. Soekarno. Tidak hanya itu, Haji Agus salim juga disertai tugas sebagai panitia penghalus bahasa yang terdiri dari tiga orang, yakni Mr. Soepomo, Haji Agus Salim dan Husein Jayadiningrat.⁷⁸

⁷⁷Ahmad Suhelmi, "*Polemik Negara Islam*", (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2001), Hlm. 75.

⁷⁸*Ibid.*, Hlm. 61.

2. Haji Agus Salim Dalam Meja Perundingan

Sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia, Haji Agus Salim terkenal sebagai seorang diplomat yang sering mewakili Indonesia dalam perundingan internasional. Sebagai seorang diplomat Ia layaknya pejuang-pejuang yang lain berusaha sekuat tenaga berjuang untuk bangsa Indonesia. Haji Agus Salim adalah salah satu tokoh yang pandai dalam hal berbicara. Haji Agus Salim tak pernah canggung dalam pergaulan internasional, karena sebagai diplomat beliau punya kemampuan berbahasa asing yang bagus dan kebanggaan yang tinggi akan bangsanya. Karenanya, pada event-event internasional penting yang dihadapinya, beliau selalu tampil percaya diri. Para tokoh yang hidup semasa perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia menjulukinya *The Grand Old Man*. Ia besar bukan karena ciri fisik atau kekuatannya bukan pula besar karena kekuasaannya, ia besar karena kecerdikan, wibawa, dan kebijaksanaanya. Tak hanya itu, ia pun pandai berdebat dan berorasi, belum lagi pemahamannya dalam ilmu agama Islam yang membuatnya menjadi panutan.

Sesungguhnya Agus Salim adalah pengusung tradisi diplomatik angkatan pertama dalam sejarah Indonesia. Karir diplomatiknya diawali dengan diangkatnya Agus Salim sebagai konsulat di Jeddah, Arab Saudi, pada kurun 1906-1911. Pengangkatan ini terwujud berkat rekomendasi ilmuwan dan ahli politik Hindia Belanda Prof. Snouck Hurgronje. Snouck Hugronje menawarkan gagasan yang menurut pendapatnya lebih baik dari pada harus meneruskan keinginannya melanjutkan studi dokter ke Belanda. Atas rekomendasi ilmuwan dan ahli politik Belanda ini, Agus Salim menerima surat dari Kementerian Luar Negeri Belanda yang ditandatangani oleh Sekretaris Gubernur Jenderal, menawarkan kepadanya untuk masuk dinas Luar Negeri Belanda yang berposisi konsulat di Jeddah, Arab Saudi. Snouck Hurgronje, yang berperan vital sebagai peletak dasar politik Islam pemerintah

kolonial Hindia Belanda sudah sejak lama mengamati Agus Salim dan dengan terus terang menilainya sebagai intelektual muda yang cerdas, mempunyai pikiran yang tajam dan keberanian yang luar biasa untuk ukuran orang Melayu.⁷⁹

Momen inilah yang sebenarnya merupakan awal kiprah Agus Salim dalam bidang diplomasi. Kecakapan dan ketangguhan Agus Salim dalam urusan debat dan negosiasi sudah teruji sejak menjadi konsulat luar negeri Belanda di Jeddah. Pada tahun 1927, Agus Salim hadir pada Mukhtar Alam Islami di Makkah dan sempat berdialog panjang dengan penguasa Saudi Arabia yang terkesan atas cita-cita Agus Salim dalam upaya menyadarkan rakyat Indonesia agar terbebas dari cengkeraman bangsa asing. Hasil dari interaksi ini Agus Salim memperoleh dana dari Raja Saudi Arabia yang dimanfaatkan untuk menerbitkan surat kabar *Fadjar Asia*, terbit tahun 1927 hingga 1930. *Fadjar Asia* adalah koran yang diterbitkan Agus Salim bersama Tjokroaminoto sebagai media pembela kepentingan rakyat yang tertindas akibat kebijakan pemerintah kolonial.⁸⁰ Surat kabar ini benar-benar mampu memancarkan sinar harapan bagi rakyat jajahan yang tertindas. Sebagai pimpinan, Agus Salim sampai turun ke lapangan, masuk kedaerah pedalaman, berbicara dan menulis mengenai penderitaan rakyat yang tak terlukiskan dengan upah yang sangat minim.

Pemberitaan dan pidato Agus Salim mengenai hal itu tersiar luas sampai melampaui batas-batas negara, pada 1930 Himpunan Serikat Buruh Belanda yang bermarkas di Amsterdam, mengangkat Agus Salim sebagai penasehat penuh mereka untuk menghadiri event Konferensi Buruh

⁷⁹ Bustomi Menggugat, “*Salimisten: Pemikiran Politik Luar Negeri Haji Agus Salim*”, (Surabaya: Pustaka Saga, 2016), Hlm. 46-47.

⁸⁰ Kustinyati Mochtar, “*Cuplikan Riwayat Hidup: Agus Salim Manusia Bebas*”, Dalam Panitia Buku Peringatan, “*Seratus Tahun Haji Agus Salim*”, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), Hlm. 73

Sedunia (ILO) di Jenewa, Swiss. Dalam konferensi itu, Agus Salim berbicara lantang kepada semesta raya tentang kekejian pemerintah kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia. Mata dunia terbelalak mendengar kecaman Agus Salim yang diserukan fasih dalam bahasa Inggris yang mengagumkan, baik karena isi pidatonya maupun cara penyampainnya. Kemudian ada seorang yang meminta supaya lain kali berpidato dalam bahasa Prancis, yang dipakai juga dalam konferensi itu. Permintaan itu dengan mudah ia penuhi, ketika datang giliran Haji Agus Salim ia berpidato dalam bahasa Prancis. Bahasa dan isi pidatonya dalam bahasa Prancis juga mendapat pujian. Banyak anggota delegasi yang kagum karena kemampuannya berbahasa dan berpidato sehingga sangat menaikkan nama Indonesia dalam forum internasional tersebut.⁸¹ Akibat dari gugatan Agus Salim di forum internasional tersebut, pemerintah kolonial Hindia Belanda terpaksa harus mengubah politik kolonialismenya karena semenjak itu, Amerika Serikat meninjau kembali politik perdagangannya dengan Belanda dan tidak mau lagi membeli hasil perkebunan Hindia Belanda yang dianggap sebagai hasil kekejaman Belanda terhadap rakyat Indonesia.⁸²

Ketika diadakan perundingan yang pertama, Inggris mengirimkan Lord Killearn, seorang diplomat ulung untuk membantu bangsa Indonesia dan Belanda mencapai suatu persetujuan. Mereka menemukan seorang tokoh seperti Haji Agus Salim yang mahir dalam beberapa bahasa, bercakap-cakap dengan diplomat tingkat atas, seolah-olah diplomasi bagi bangsa Indonesia suatu pekerjaan yang juga sudah dijalankan berabad-abad.⁸³ Haji Agus Salim

⁸¹ Mohamad Roem, *“Memimpin Adalah Menderita: Kesaksian Haji Agus Salim”*, Dalam Taufik Abdullah, Aswab Mahasin, Daniel Dhakidae (ed), *“Manusia Dalam Kemelut Sejarah”*, (Jakarta: LP3ES, 1978), Hlm. 115.

⁸² *Ibid.*, Hlm. 74

⁸³ *Ibid.*, Hlm. 218.

adalah salah satu orang yang sangat di segani dan dihormati dikalangan Inggris pada waktu itu. Ketika diadakan perundingan Linggarjati Haji Agus Salim didaulat menjadi penasihat dan menjadi orang kedua disamping Sutan Syahrir. Haji Agus salim memang tidak ikut langsung dalam perundingan, akan tetapi dalam hubungan dengan anggota delegasi dari pihak Belanda maupun Inggris, Ia sebagai *Lobbyist* mendapat penghargaan.⁸⁴

Dalam perundingan Renville, Haji Agus Salim masuk sebagai anggota delegasi Indonesia dengan beberapa anggota lainnya seperti Mr. Amir Syarifuddin, Mr. Ali Sastroamijoyo, Dr. Tjoa Sik Ien, Sutan Syahrir, Mr. Nasrun dan Ir. Juanda. Perundingan ini akhirnya berhasil dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 diatas kapal perang Renville, sebagai ketua perundingan adalah wakil dari belgia dan atas usul wakil Australia perundingan itu disebut perundingan Renville. Perundingan ini berakhir pada tanggal 17 Januari 1948 dan menghasilkan perjanjian yang ditandatangani oleh Abdul Kadir Wijoyoatmojo sebagai wakil Belanda sedangkan Indonesia diwakili oleh Mr. Amir Syarifuddin. Dalam perundingan Renville ini Komisi Tiga Negara memberikan sumbangan tentang prinsip tambahan dalam usaha penyelesaian politik terutama mengenai soal prosedur pembentukan Negara Indonesia Serikat dan pemerintahan dalam masa peralihan. Namun perjanjian Renville tidak membawa kebahagiaan bagi negara Republik Indonesia dan pemerintahannya.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.*, Hlm. 128.

⁸⁵ Mukayat, dkk, "*Haji Agus Salim: Karya Dan Pengabdiannya*", (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1985), Hlm. 75.

3. Menghadiri Inter Asian Conference di New Delhi, India

Pada hari Sabtu 15 Maret 1947 Tuan Muhammad Abdul Mun'im, Konsul Jenderal Mesir di Bombay dan Utusan Istimewa Liga Arab menghadap Presiden Soekarno untuk menyampaikan pesan-pesan dari Liga Arab. Beliau menyampaikan keputusan Sidang Dewan Liga Arab pada tanggal 18 Nopember 1946 yang berisi anjuran agar negara-negara anggotanya mengakui Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat.⁸⁶ Selanjutnya beliau mendesak agar Republik Indonesia mengirim delegasi ke Mesir, sekaligus ikut menghadiri Inter Asian Conference di New Delhi. Menanggapi hal tersebut, Sjahir memutuskan untuk mengirim delegasi Republik Indonesia ke Mesir dan menerima undangan dari Nehru. Meskipun keberangkatannya ke New Delhi berarti tertundanya beberapa pelaksanaan Persetujuan Linggarjati, tetapi pengiriman utusan diplomatik ke New Delhi itu akan memberi manfaat jauh lebih besar. Dapat diperkirakan bahwa betapa pentingnya kedudukan Pemerintah India kelak terhadap perjuangan RI. Selain itu, Konferensi di New Delhi ini akan memberi kesempatan pula untuk mengatur hubungan dengan negara-negara tetangga seperti Birma, Thailand, Tiongkok, dan lainnya.⁸⁷

Dengan kampanye pencitraan negatif oleh Belanda, maka pihak Republik berusaha mengimbanginya dengan mengirimkan misi diplomatik ke berbagai forum internasional. Sebelum mendarat di Kairo, Mesir, Haji

⁸⁶ A.R. Baswedan, "*Catatan dan Kenangan*", Dalam Panitia Peringatan HUT Ke-32 Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir, *Sekitar Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir Tahun 1947*, (Jakarta, 1978), Hlm. 52.

⁸⁷ Agustinus Supriyanto, "*Peran Konsul Jenderal Mesir Di India Tahun 1947 Bagi Status Internasional Republik Indonesia*", (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, September 2006), Hlm. 176.

Agus Salim serta delegasi Indonesia terlebih dulu menghadiri Konferensi Hubungan Antar-Asia (*Inter-Asian Relation Conference*) pada 23 Maret 1947 di New Delhi, India. Pada waktu itu pemerintah Indonesia diundang untuk turut hadir sehingga Haji Agus Salim selaku Menteri Muda Luar Negeri diutus ke New Delhi sebagai penasehat delegasi Indonesia dalam konferensi tersebut untuk menggalang solidaritas dari negara-negara Asia yang peduli pada perjuangan bangsa Indonesia. Ketika itu, perjuangan kemerdekaan Indonesia telah menjadi sangat populer di India dan mendapat bantuan dan sokongan yang amat meriah dari partai-partai dan rakyat India.⁸⁸

Dalam pengakuan B.A. Ubain dan Mohammad Moein mengatakan, “Delegasi disambut dengan meriah di lapangan terbang Palm di New delhi. Pak Haji Agus Salim yang bertubuh kecil, berjenggot putih, berpeci khas dan berusia lanjut itu menarik perhatian masyarakat India karena beliau lincah dan aktif dan suka bergaul dengan siapa saja. Beliau menguasai banyak bahasa asing, seperti inggris, perancis dan arab, dan pintar membicarakan segala sesuatu, dari soal politik, ekonomi dan sosial hingga sampai kepada pengobatan timur tradisional dengan gaya yang mudah dimengerti oleh si pendengarnya. Selama berada di New Delhi sampai akhir konferensi tanggal 1 april 1947, beliau aktif bertemu dan bertukar pikiran dengan pimpinan pemerintah India (yang masih bersifat interim), pemimpin-pemimpin dari Indian National Congress dan All-India Muslim League, seperti Pandit Jawaharlal Nehru dan Muhammad Ali Jinnah”.⁸⁹

⁸⁸ R. Suharso, “*Peran dan Nilai-Nilai Perjuangan Tokoh Nasional dan Daerah Dalam Mempertahankan Keutuhan Negara dan Bangsa Indonesia Pada Masa 1945-1965*”, (Pendalaman Materi Sejarah Indonesia PPG Dalam Jabatan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi), Hlm. 4.

⁸⁹ B.A.Ubain dan Mohammad Moein, “*Konperensi Hubungan Antar-Asia*”, Dalam Panitia Peringatan Seratus Tahun Haji Agus Salim,

Jawaharlal Nehru menerangkan bahwa maksud dari *Inter Asian Conference* ini adalah membicarakan masalah kebudayaan, sosial, dan ekonomi.⁹⁰ Meskipun bukan konferensi politik, namun wakil delegasi Indonesia berhasil memberikan gambaran tentang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaannya. Setelah kunjungan ke New Delhi hubungan Indonesia dan India semakin ditingkatkan. India juga terus mendukung perjuangan Indonesia. Berturut-turut pada tanggal 28 dan 29 Agustus 1947 pesawat India tiba di Yogyakarta membawa obat-obatan dan tiga orang dokter yang secara sukarela membantu perjuangan rakyat Indonesia. India juga terus membantu perjuangan diplomasi di forum internasional.⁹¹ Salah satu poin penting dari hasil konferensi ini adalah dibentuknya sebuah organisasi yang dapat memayungi kepentingan negara-negara di Asia saat itu yakni Asians Relations Organization yang diharapkan dapat menjadi jembatan bagi pengakuan kedaulatan Indonesia. Selanjutnya Southeast Asian Section juga akan mengadakan sebuah konferensi khusus di bulan April 1948. Beberapa negara yang akan menjadi peserta antara lain Indonesia, India, Birma, Thailand, Malaysia dan Filipina.⁹²

“*Seratus Tahun Haji Agus Salim*”, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), Hlm. 157-158.

⁹⁰ Mohamad Bondan, “*Genderang Proklamasi di Luar Negeri*”, (Djakarta: Kawal, 1971), Hlm. 89.

⁹¹ Ginandjar Kartasasmita, dkk, “*30 Tahun Indonesia Merdeka: 1945-1955*”, (Jakarta: Sekretariat Negera Republik Indonesia, 1997), Hlm. 170.

⁹² Rudolf Mrazek, “*Sjahir Politik dan Pengasingan di Indonesia*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), Hlm. 595.

B. Hasil Perjuangan Haji Agus Salim Sebagai Diplomat Indonesia

Persyaratan untuk menjadi seorang diplomat, seperti pengetahuan umum yang luas, pengetahuan sejarah, kebudayaan serta peradaban bangsa-bangsa, hukum internasional, pengetahuan serta penguasaan bahasa asing, pribadi yang berwatak, sikap yang luwes, ramah tamah tanpa mengorbankan prinsip, segalanya dimiliki oleh Haji Agus Salim. Demikian juga dengan wajah senyum dan simpatik. Tenang, tapi bila perlu setiap saat siap menghadapi tangkisan pihak lawan. Atau dengan kata lain, ramah tapi selalu waspada.

Sebagai negara merdeka, Indonesia dihadapkan pada konsekuensi berupa perlunya dukungan alias pengakuan dari beberapa negara baik secara *de jure* dan *de facto*. Peran diplomatik Agus Salim pun dimainkan kembali. Ia menjadi pembawa amanah penting untuk melobi negara-negara luar agar memberikan pengakuan atas kehadiran negara baru bernama Indonesia. Namun, Haji Agus Salim menyadari bahwasanya perjuangan melalui jalur diplomasi tidak akan mudah. Hambatan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dan pertentangan pendapat dalam negeri soal diplomasi adalah tantangan yang harus dihadapi. Meskipun usianya tidak muda lagi, ia mencurahkan segala kemampuannya untuk mengabdikan pada negara.

1. Misi Diplomatik ke Negara-Negara Timur Tengah

Sesudah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, Indonesia mendapat tantangan yang berat dalam memperjuangkan dan menyuarakan kemerdekaannya. Pada era ini terdapat norma internasional yang mensyaratkan bagi entitas politik yang baru lahir untuk mendapat *recognition* atau kedaulatan menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo, 27 Desember 1933 mengenai Hak-Hak dan Kewajiban

Negara menyebutkan bahwa unsur konstitutif ke-4 bagi pembentukan negara. Sehingga suatu negara bisa dikatakan berdaulat baik secara *de facto* maupun *de jure*.⁹³ Dengan kata lain, negara yang berdiri hanya dengan berlandaskan adanya wilayah, penduduk dan pemerintah sudah dipastikan akan mendapat kesulitan dalam berinteraksi dengan negara lain dikancah internasional. Pengakuan atau *recognition* dari negara-negara lain adalah mutlak adanya.

Dalam memperjuangkan dan menyuarakan kemerdekaannya, Indonesia membutuhkan pengakuan dari dunia internasional. Pengakuan sebagai negara baru ditandai bahwa negara tersebut bagian dari masyarakat internasional. Pada tanggal 13-16 Maret 1947 pemerintah Mesir mengirimkan utusan resmi ke Indonesia yaitu Mohammad Abdul Mun'im, ia adalah konsul jenderal Mesir di Bombay yang bertindak atas nama Raja Farouk menyampaikan keputusan sidang Dewan Gabungan Negara-negara Arab (Liga Arab) yang berisi anjuran agar negara-negara anggota Liga Arab untuk mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Keputusan tersebut disampaikan kepada presiden Soekarno dalam pertemuan di Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 1947.⁹⁴ Dengan kejadian ini, dalam sejarah diplomatik Republik Indonesia dapat ditemukan dua peristiwa penting. *Pertama*, satu utusan Mesir dengan menghadapi bahaya menyampaikan pengakuan negaranya dan pengakuan Liga Arab kepada Republik Indonesia. *Kedua*, untuk pertama kalinya Republik Indonesia menyambut kedatangan utusan negara asing sekaligus utusan organisasi internasional.

⁹³ Dr. Boer Mauna, "*Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*", (Bandung: PT. Alumni, 2005), Hlm. 23-24.

⁹⁴ Ginandjar Kartasmita, dkk, *op.cit.*, Hlm. 149.

Dapat dikatakan bahwa kedatangan Konsul Jenderal Mesir sebagai utusan Liga Arab kepada pemerintah Republik Indonesia telah membuka pintu yang lebar bagi diplomasi Republik Indonesia untuk dapat secara intensif berhubungan dengan negara-negara lain. Sebagai kelanjutan dari kedatangan utusan Mesir itu, maka berangkatlah sebuah misi resmi yang pertama kalinya dikirim oleh Republik Indonesia ke negara-negara Arab yang diketuai oleh Haji Agus Salim. Delegasi berangkat pada tanggal 16 Maret 1947 ke Bombay dan setelah mengadakan persiapan di Bombay meneruskan perjalanan ke Mesir.⁹⁵ Haji Agus Salim ditunjuk sebagai ketua delegasi bersama rekan-rekannya, yakni Abdul Rahman Baswedan, Mohammad Rasyidi, Abdul Kadir dan Sutan Nazir Pamoentjak untuk misi Indonesia ke negara-negara Timur Tengah. Penunjukannya sebagai ketua juga tak lepas dari pengetahuan politiknya yang luas mengenai negara-negara Arab dan Timur Tengah.

Setiba di Mesir pada tanggal 19 April 1947, delegasi Republik Indonesia diterima sebagai tamu Liga Arab selama empat bulan. Kegiatan pertama delegasi Republik Indonesia adalah mengadakan pertemuan dengan para mahasiswa yang tergabung dalam PPKI. Haji Agus Salim mewakili pemerintah Republik Indonesia mengatakan bahwa, “Kegiatan panitai di Timur Tengah telah memungkinkan Republik Indonesia dengan resmi memasuki perjuangan diplomatik di forum internasional. Dukungan negara-negara Arab telah diperoleh para mahasiswa ini. Dengan kata lain, kegiatan politik para mahasiswa di Timur Tengah telah melapangkan jalan formal perjuangan diplomatik pemerintah Republik Indonesia”. Kegiatan kedua, delegasi Republik Indonesia

⁹⁵ H.M Rasyidi, “*Negara-negara Arablah yang Pertama Mengakui Kemerdekaan Bangsa Indonesia*”, Dalam *Sekitar Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir Tahun 1947*, (Jakarta: Panitia Peringatan Hut ke-32 Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir, 1978), Hlm. 22.

memulai kunjungan-kunjungan kehormatan dengan mengunjungi Istana Abidin untuk mencatatkan nama mereka dalam daftar penghormatan kerajaan, sebagai penghormatan kepada Raja Farouk. Bagi perjuangan diplomatik Republik Indonesia, hal itu dilakukan sebagai penghargaan kepada Raja Farouk yang telah mendorong pemerintah Mesir lebih tegas mendukung Republik Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya. Bahkan pemerintah Mesir memberikan pengakuan *de facto* kepada PPKI sebagai perwakilan Republik Indonesia sementara, sambil menunggu perwakilan Republik Indonesia resmi didirikan⁹⁶.

Kegiatan ketiga, delegasi Republik Indonesia melakukan kunjungan resmi kepada Abdulrahman Azzam Pasya, Sekjen Liga Arab sebagai tuan rumah. Kepada delegasi Republik Indonesia, Pasya mengatakan bahwa para mahasiswa Indonesia telah berhasil menyampaikan kepentingan Republik Indonesia kepada negara-negara Arab. Kegiatan keempat, delegasi Republik Indonesia melakukan kunjungan kehormatan kepada Mahmud Fahmi Nokrasyi Pasya, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Mesir di Kementerian Luar Negeri Mesir. Kunjungan ini dimaksudkan untuk menunjukkan tujuan utama delegasi Republik Indonesia ke Timur Tengah adalah untuk mengadakan hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan negara-negara Arab⁹⁷.

Sebelum Agus Salim menandatangani perjanjian persahabatan, Nokhrashi Pasha bertemu dengan seorang perwakilan Belanda di Mesir yang menyelonong masuk ke ruangnya. Tamu itu memprotes rencana penandatanganan perjanjian Indonesia-Mesir tersebut dan mengingatkan soal hubungan ekonomi Mesir dan Belanda.

⁹⁶ M. Zein Hassan, “*Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri: Perjuangan Pemuda/Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah*”, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1980), Hlm. 202.

⁹⁷ *Ibid.*, Hlm. 203-204.

Belanda menuding, melalui perjanjian itu Indonesia mengkhianati perjanjian Linggarjati yang mendudukan Indonesia di bawah persemaikuran Belanda. Seperti yang ditulis A.R. Baswedan, Nokhrashi Pasha menolak permintaan itu dan berkata, “Menyesal sekali kami harus menolak protes Tuan. Sebab, Mesir selaku negara berdaulat dan sebagai negara yang berdasarkan Islam tidak bisa tidak mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang beragama Islam. Ini adalah tradisi bangsa Mesir dan tidak dapat diabaikan”. Perwakilan Belanda meninggalkan ruangan Nokhrashi dengan raut kecewa⁹⁸.

Setelah mengadakan perundingan dengan Pemerintah Mesir, pada tanggal 10 Juni 1947 ditandatangani Perjanjian Persahabatan Hubungan Diplomatik dan Konsuler dan Perjanjian Perdagangan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Mesir, di ruang kerja Mahmud Fahmi Nokhrashi Pasha. Menanggapi perjanjian persahabatan ini, Presiden Republik Indonesia menguasai Haji Agus Salim sebagai Menteri Muda Luar Negeri dan ketua utusan dari pada Republik Indonesia dan Baginda Raja Mesir menguasai Mahmoud Fahmi Nokhrashi Pasha sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri. Setelah menunjukkan surat kuasanya yang sah dan lengkap dan semupakat atas ketentuan-ketentuan yang berikut:⁹⁹

Pasal 1

Kedua belah pihak dalam Perjanjian ini masing-masing menyanggupi akan memeliharaakan baiknya perhubungan terhadap kepada pihak yang lain, serta mempererat pertalian-persahabatan yang menghubungkan antara rakyat pihaknya dengan rakyat pihak yang lain dan

⁹⁸ Seri Buku Tempo: Bapak Bangsa, “Agus Salim: Diplomat Jenaka Penopang Republik”, (Jakarta: PT Gramedia, 2013), Hlm. 11-12.

⁹⁹ BPHN, “Undang-Undang No 2 Tahun 1948 Tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Negara Kerajaan Mesir”, diakses dari <https://www.bphn.go.id/data/documents/48uu002.pdf>, pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 10.39.

mengadakan peraturan yang perluperlu, masing-masing di dalam daerah negaranya, bagi mencegah perlakuan tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum terhadap kepada keamanan damai atau ketenteraman pada pihak yang lain.

Pasal 2

Kedua belah pihak dalam Perjanjian ini semupakat akan mengadakan perhubungan diplomasi dan kekonsolan antara kedua negaranya. Utusan-utusan diplomasi, demikian juga penjabatpenjabat kekonsolan dari pada tiap-tiap antara dua belah pihak itu beroleh perlakuan istimewa yang terpakai menurut umumnya asas-asas Hukum Internasional Umum, yaitu dengan memakai asas persamaan perlakuan antara kedua belah pihak.

Pasal 3

Kedua belah pihak dalam Perjanjian ini memutuskan akan mengadakan pula sebuah persetujuan perniagaan sementara, bersetujuan dengan dua pucuk surat yang diiringkan kepada Perjanjian-Negara ini.

Pasal 4

Kedua belah pihak akan mengesahkan Perjanjian-Negara ini secepat dapat dilakukannya. Dan mulai berlakunya dari tanggal serah-menyerahkan surat-surat pengesahan itu di Cairo dan berlakunya untuk masa lima tahun dengan berlangsung terus dengan sendirinya padahal masing-masing daripada kedua belah pihak boleh membatalkan berlakunya itu asal dengan memberi tahu kepada pihak yang lain waktu tiga bulan sebelumnya.

Pasal 5

Surat Perjanjian-Negara ini diperbuat dengan naskah yang sama bunyinya dan sama kekuatannya dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Perancis.

Tertulis di Cairo pada hari tanggal 21 bulan Rajab tahun 1366 bersamaan dengan hari tanggal 10 bulan Juni 1947.

Dengan demikian, Mesir adalah negara pertama yang mengakui Republik Indonesia secara *de jure* dan *de facto*

atas kedaulatan Indonesia.¹⁰⁰ Perjanjian tersebut terdiri dari lima pasal dan ditulis dalam tiga bahasa, yaitu bahasa Perancis, Arab dan Indonesia. Selain perjanjian persahabatan tersebut, Mesir juga mengadakan perjanjian perdagangan dengan pihak Indonesia. Tentu bukan suatu misi yang mudah, apalagi saat itu pemerintah Hindia Belanda dan Kerajaan Belanda tak begitu saja membiarkan Indonesia memperoleh dukungan dari negara-negara lain. Di nusantara, Belanda melakukan langkah-langkah politik dan militer. Sementara di luar negeri, mereka pun tak tinggal diam, para diplomat Belanda tak akan membiarkan Indonesia diakui dunia Internasional.

Kata H.M. Rasjidi dalam *Seratus Tahun Haji Agus Salim*, “Pengakuan Mesir telah menghancurkan harapan Belanda untuk dapat kembali menguasai Indonesia”. Perjanjian persahabatan Indonesia-Mesir seakan memicu negara-negara Arab dan Timur Tengah yang telah merdeka untuk berusaha mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan melakukan perjanjian persahabatan di antara mereka. Setelah Mesir mengakui kedaulatan Indonesia negara-negara Arab lainnya yang mengakui Indonesia antara lain: Syiria, Yordania, Irak, Lebanon, Saudi Arabia, dan Yaman. Kontribusi Liga Arab begitu besar dalam menghubungi Negara-negara anggotanya untuk menerima misi diplomatik Republik Indonesia sebagai tamu Negara. Hal ini ditunjukkan oleh Abdurrahman Azzam Pasya yang memberi dukungan selama kunjungan misi diplomatik ini keseluruhan Negara Arab.¹⁰¹

¹⁰⁰ Achmad soebardjo, “*Selayang Pandang Tentang Peristiwa Penting Dalam Sejarah*”, Dalam Sekitar Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir Tahun 1947, (Jakarta: Panitia Peringatan Hut ke-32 Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir, 1978), Hlm. 17.

¹⁰¹ Suranta Abd. Rahman, “*Diplomasi RI di Mesir dan Negara-Negara Arab pada Tahun 1947*”, WACANA UI, Vol. 9 No. 2, Oktober 2007, Hlm. 168.

Melalui Surat No. 155/L tanggal 7 Agustus 1947 Haji Agus Salim menyampaikan kepada Kerajaan Mesir keberlangsungan tugas Delegasi Republik Indonesia untuk negara-negara Arab sebagai berikut: Mohammad Rasyidi ditugaskan sebagai *Charge d’Affaires*, Sutan Nazir Pamoentjak sebagai *Counsellor*, Mohammad Zein Hassan sebagai Sekretaris I dan Mansur Abu Makarim sebagai Sekretaris II. Mereka menjadi staf Kedutaan Republik Indonesia pada tingkat *Charge d’affaires* di Kairo, Mesir. Ini merupakan Kedutaan Republik Indonesia yang pertama dibuka di luar negeri semenjak Proklamasi.¹⁰² Staf ini juga merangkap sebagai Misi Diplomatik Republik Indonesia tetap untuk negara-negara anggota Liga Arab.

Setelah selesai dari Mesir tujuan delegasi Indonesia adalah Republik Syiria. Di Syiria, delegasi Republik Indonesia mendapat sambutan resmi pemerintah Republik Syiria. Pada tanggal 2 Juli 1947 pemerintah Republik Indonesia dan Republik Syiria sepakat menandatangani perjanjian persahabatan hubungan diplomatik dan konsuler antara kedua belah pihak. Pihak Indonesia diwakili oleh Haji Agus Salim, sedangkan Syiria diwakili oleh Jamil Mardam Bey sebagai Menteri Luar Negeri Syiria. Naskah Perjanjian tersebut sama isinya dengan Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir, tetapi tidak memasukkan Perjanjian Perdagangan. Dengan demikian Syiria juga mengakui secara *de jure* adanya Republik Indonesia.¹⁰³ Upaya-upaya misi diplomatik ini dibutuhkan bukan hanya perlawanan bersenjata untuk memenangkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.

Setelah Pengakuan dan Perjanjian Persahabatan dari Republik Syiria diperoleh, delegasi Republik Indonesia melanjutkan perjalanan ke Amman, ibukota Yordania. Pada waktu itu, Amir Abdullah meminta kepada misi

¹⁰²*Ibid.*, Hlm. 267-269.

¹⁰³ Mukayat, 1981.

diplomasi Republik Indonesia ini agar formalitas pengakuan kemerdekaan ditangguhkan, karena meskipun Yordania telah merdeka seluruh anggaran belanjanya masih dibantu Inggris. Walaupun demikian, dalam kenyataannya pemerintah Yordania mendukung keputusan Liga Arab pada 18 november 1946 untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Misi diplomasi Republik Indonesia selanjutnya meneruskan kunjungan ke Baghdad, Irak. Sambutan rakyat dan pemimpin Irak sangat meriah walaupun dalam hal pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia masih dipertimbangkan karena kuatnya pengaruh Inggris yang mendukung Belanda di wilayahnya. Pada kenyataannya, Irak telah mengumumkan pengakuannya atas kemerdekaan Republik Indonesia seperti yang dinyatakan Liga Arab, tetapi masih menangguhkan penandatanganan perjanjian persahabatan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Mesir.

Kemudian misi diplomasi Republik Indonesia melakukan kunjungan mereka ke Lebanon, bertepatan dengan agresi militer I Belanda terhadap wilayah Republik Indonesia. Haji Agus Salim sebagai ketua delegasi ini meragukan sikap pemerintah Lebanon yang tidak akan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, karena pemerintah Lebanon dekat dengan bangsa Barat. Akan tetapi, Riadh Solh Bey yang menjabat sebagai Perdana Menteri Lebanon pernah menyaksikan "*Film Proklamasi*" ketika hadir dalam resepsi misi diplomasi Republik Indonesia di Kairo, akhirnya Republik Indonesia mendapat pengakuan Lebanon pada tanggal 29 juni 1947 sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat penuh.

Mulai 7 agustus 1947 H.M. Rasyidi menjadi ketua misi diplomasi Republik Indonesia untuk Negara-negara Arab. Ia menggantikan dan meneruskan usaha Haji Agus Salim yang mendadak pergi untuk menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB pada 12 agustus 1947. H.M. Rasyidi berkunjung ke Saudi Arabia pada musim haji tahun 1947 didampingi oleh Sekretaris Jenderal Liga

Arab, Abdurrahman Azzam Pasya menghadap Raja Abdul Aziz. Haji Agus Salim menyampaikan permohonan maafnya kepada Raja Abdul Aziz Al-Saud melalui H.M. Rasyidi karena tidak dapat melanjutkan perjalanannya ke Jeddah, Saudi Arabia karena pada waktu itu Belanda sedang mengadakan agresi militernya terhadap Republik Indonesia dan Haji Agus Salim harus menghadiri Sidang Dewan Keamanan PBB di New York.¹⁰⁴ Dalam kunjungan tersebut, Raja Abdul Aziz Al Saud memberikan surat pengakuan kerajaan Saudi Arabia kepada pemerintah Republik Indonesia pada 21 november 1947. Pada waktu yang bersamaan, pihak Kedutaan Belanda di Saudi Arabia mengutus Sultan Pontianak, Abdul Hamid menghadap Raja Abdul Aziz Al Saud untuk mengagalkan usaha misi diplomatik Republik Indonesia di Saudi Arabia. Usaha kaki tangan Belanda ini tidak berhasil menggagalkan pengakuan Raja Abdul Aziz Al Saud terhadap kemerdekaan Republik Indonesia.

Kerajaan Yaman, sebagai Negara Arab yang merdeka memberikan pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia pada 20 november 1947. Pada waktu itu, Yaman masih tertutup dan belum mempunyai perwakilan di luar negeri selain di Liga Arab. Wakil Kerajaan Yaman di Liga Arab Ali Al Muayyad telah menandatangani kuasa usaha Republik Indonesia di Mesir dan menyampaikan pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan Negara-negara Arab ini merupakan keberhasilan misi diplomatik Republik Indonesia. Haji Agus Salim sebagai Menteri Muda dalam kabinet Syahrir memang secara gencar memperkenalkan Indonesia ke dunia luar. Dan ketika ada pergantian kabinet Syahrir ke kabinet Amir Syarifuddin, dari Timur Tengah Haji Agus Salim tidak kembali ke tanah air, namun meneruskan misinya keberbagai negara

¹⁰⁴ *Ibid*, Hlm. 170.

dalam kedudukannya sebagai Menteri Luar Negeri.¹⁰⁵ Dapat disimpulkan bahwa usaha dari Haji Agus Salim dalam merangkul negara-negara Arab agar mau mengakui negara Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat merupakan sebuah keberhasilan yang luar biasa dan merupakan tonggak sejarah diplomasi dalam hubungan luar negeri Indonesia.

Peran yang dilakukan Haji Agus Salim membuahkan hasil dengan didapatkannya pengakuan baik *de facto* maupun *de jure* dari Mesir, Syiria, Lebanon, Arab Saudi, Kerajaan Yaman dan Afghanistan. Pengakuan ini tentu memerlukan tingkat *lobby* atau diplomasi-diplomasi tingkat tinggi. Hal ini cukup beralasan, mengingat Indonesia melalui Haji Agus Salim hanya mendapat pengakuan secara *de facto* saja dari India dan Pakistan. Hasil yang berbeda tersebut menunjukkan usaha diplomasi yang dilakukan cukup alot, tetapi hasilnya signifikan sehingga mengindikasikan bahwa aktor dibalik keberhasilan tersebut merupakan tokoh dengan kapasitas mumpuni. Pengakuan kapasitas ini setidaknya dapat diwakili dari pernyataan dari Prof. Schermerhoon (diplomat Belanda di era Haji Agus Salim) sebagai berikut: "Ia seorang yang sangat menarik, sedang kita melihat juga dengan jelas sekali betapa ia dihormati dikalangan Inggris. Ini berlaku juga bagi orang-orang Indonesia diluar kaum republik...dalam hubungan ini khusus saya ingat kepada Salim, yang suatu hari akan saya undang ke istana. Orang tua yang sangat pandai ini seorang jenius dalam bidang bahasa, mampu bicara dan menulis dalam paling sedikit Sembilan bahasa, mempunyai hanya satu kelemahan yaitu selama hidupnya melarat. Pada waktu ini, ia jelas bermain kea rah kita. Akhirnya ia Menteri Muda Luar Negeri dank arena itu orang kedua di samping Syahrir dalam perundingan.

¹⁰⁵ *Ibid*, Hlm. 4.

Barangkali ia yang paling panda dari seluruh mereka itu”¹⁰⁶

¹⁰⁶ *Ibid*, Hlm. 5-6.

2. Pembahasan Agresi Militer Belanda di Dewan Keamanan PBB

Dalam pelaksanaannya, hasil perundingan Linggarjati berjalan sangat seret terutama disebabkan oleh sikap Belanda yang mengingkari butir-butir persetujuan berdasar alasan yang dibaut-buat. Kemudian, Belanda membatalkan persetujuan dengan cara mengambil kembali kebebasan untuk bertindak yaitu menyerang dan berperang melawan Republik Indonesia dengan berbagai alat peperangan modern. Sejarah mencatat, agresi militer Belanda I yang terjadi pada 21 Juli-5 Agustus 1947 ini menimbulkan protes dari berbagai pihak, baik dalam Negeri Belanda maupun dari luar negeri seperti India dan Australia yang memprotes agresi militer tersebut. Aksi ini tidak diperbolehkan oleh Dewan Keamanan PBB yang sudah mengikat diri dengan Piagam PBB untuk menghindari terjadinya peperangan dan memberi jalan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai.¹⁰⁷ Agresi ini jelas merupakan peluang Indonesia untuk melemahkan dukungan terhadap Belanda di forum internasional.

Setelah sukses menjalankan misi diplomatik di negara-negar Arab dan Timur Tengah, Haji Agus Salim melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat. Pada 10 Agustus 1947, ia tiba di lapangan terbang La Guardia, New York. Berhubung pada tanggal 12 Agustus 1947 akan diadakan sidang Dewan Keamanan PBB guna membicarakan sengketa antara Indonesia dan Belanda, maka dengan perantara Radio Republik Indonesia Yogyakarta, pemerintah Indonesia mengajukan permohonan kunjungan resmi kepada Dewan Keamanan PBB. Lembaga internasional itu diminta untuk menerima Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Haji Agus Salim dan penasehatnya Sutan Sjahrir untuk menghadiri persidangan guna memberikan keterangan jika persetujuan

¹⁰⁷ Kustinyati Mochtar, "*Mohammad Roem: Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI*", (Jakarta: PT Gramedia, 1989), Hlm. 7.

Indonesia dan Belanda dibicarakan. Selain Agus Salim, delegasi Indonesia adalah Sutan Sjahrir, Charles Tambu, Soedjatmiko, dan Sumitro Djojohadikusumo. Tanggal 14 Agustus 1947, Sutan Sjahrir diberi ijin untuk pertama kali memberikan keterangan tentang keadaan Indonesia selaku duta Republik Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Ia pun mengungkapkan secara jelas eksploitasi Belanda atas Indonesia. Sjahrir sukses mematahkan argument yang disampaikan wakil Belanda, van Kleffens. Rosihan Anwar, dalam buku *Sutan Sjahrir: True Democrat, Fighter For humanity, 1909-1906*, menulis, "Tanggal 14 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membicarakan sengketa Indonesia-Belanda sebagai kasus dekolonisasi pertama sejak berdirinya PBB"¹⁰⁸.

Berkat kepandaian diplomasi yang mereka miliki, beberapa hasil positif dapat diraih. Antara lain, akhirnya PBB bersedia memberikan dukungan bagi Bangsa Indonesia. Dewan Keamanan PBB menyerukan agar diadakan gencatan senjata dan pembentukan Komisi Tiga Negara (KTN). Akibat keputusan Dewan Keamanan ini, maka pada tanggal 6 September 1947 kabinet Amir Syarifuddin atas usul Haji Agus Salim meminta agar Australia bersedia menjadi wakil Indonesia dan Belanda menunjuk Belgia sebagai wakilnya. Kemudian pada tanggal 19 September 1947, Australia dan Belgia menunjuk Amerika Serikat sebagai pihak penengah.¹⁰⁹ Setelah anggota KTN datang ke Indonesia, diputuskan akan diadakan perundingan Renville. Perundingan ini berlangsung tanggal 8 Desember 1947-17 Januari 1948. Setelah kunjungan Haji Agus Salim ke negara-negara Timur Tengah, Belanda sangat marah karena Republik Indonesia tak hanya diakui secara *de facto* tapi juga secara *de jure*. Dalam perundingan Renville, Belanda masih tetap ngotot menghalangi dan menutup pengakuan *de jure* untuk

¹⁰⁸ *Ibid*, Hlm. 14.

¹⁰⁹ *Ibid*, Hlm. 73.

Republik atas dasar hukum internasional. Dalam suatu pertemuan di Yogyakarta tahun 1948, sekali lagi perunding Belanda menegaskan pendirian negerinya itu. Dan ini sungguh membuat para perunding Republik dengan terpaksa menerima keputusan tersebut.

Namun, Haji Agus Salim juru runding Republik yang cekatan itu beraksi dengan spontan. Dalam pengantar buku *Hadji Agus Salim: Pahlawan Nasional* (1965), Mohammad Hatta mengisahkan bagaimana Agus Salim merespon amarah Belanda atas pengakuan itu, “Kalau Tuan-tuan menganggap usaha kami untuk mendapatkan pengakuan *de jure* dari negara-negara Arab atas Republik itu bertentangan dengan Perjanjian Linggarjati, apakah aksi militer yang Tuan lancarkan terhadap kami sesuai dengan Perjanjian Linggarjati? Pengakuan *de jure* yang kami peroleh adalah akibat dari aksi militer Tuan. Kalau Tuan-tuan melancarkan sekali lagi aksi militer terhadap kami, maka kami akan mencapai pengakuan *de jure* dari seluruh dunia¹¹⁰.”

Pikiran tajam yang keluar dari mulut dan hati Haji Agus Salim yang jengkel terhadap desakan Belanda, seolah-olah merupakan amunisi dan sekaligus nujum terhadap perkembangan selanjutnya. Sikap keras Belanda akhirnya membuat mereka sekali lagi melancarkan serangan militernya yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II, 18 Desember 1948. Ketika terjadi Agresi Militer Belanda II, serangan mendadak Belanda akhirnya berhasil menguasai Yogyakarta. Para pemimpin negara yang sedang membicarakan situasi politik di istana presiden akhirnya berhasil ditangkap oleh Belanda.¹¹¹ Benar seperti yang dikatakan Haji Agus Salim, dunia internasional semakin berpaling ke Indonesia dan

¹¹⁰ *Ibid*, Hlm. 4.

¹¹¹ St. Sularto, “*Haji Agus Salim (1884-1954): Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), Hlm. 27.

memaksa Belanda untuk kembali berunding. Berkaitan dengan Agresi Militer tersebut, bantuan dari PBB Terus berlanjut dan Amerika Serikat mengancam akan menghentikan bantuan keuangan kepada Belanda. Dalam situasi yang genting itu, presiden Soekarno memerintahkan kepada Menteri Kemakmuran RI Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat karena Mr. Syafrudin berada di Sumatera¹¹².

Kesalahan Belanda yang beranggapan bahwa Amerika Serikat akan mendukung langkah Belanda dalam aksi militernya ternyata salah besar. Amerika Serikat justru mendesak Belanda agar menyelesaikan sengketa ini dengan damai melalui jalan perundingan. Pemerintah Amerika Serikat dengan gigih menentang aksi tersebut dan atas prakarsa Dewan Keamanan PBB diadakanlah sidang untuk mengancam tindak Agresi Belanda tersebut. Dan juru bicara Amerika Serikat dalam Dewan Keamanan yaitu Prof. Jessup pun mengeluarkan sebuah *Statement*, ”bahwa sekarang waktunya telah lampau untuk melihat sengketa Indonesia-Belanda secara terpotong-potong”.¹¹³ Dewan Keamanan yang kebetulan sedang bersidang di Paris, segera membicarakan sengketa Indonesia dan Belanda begitu mereka mendengar laporan dari Panitia Jasa Baik atau Komisi Tiga Negara (KTN) kepada Dewan Keamanan PBB yang isinya menghujat tindakan militer Belanda. Dalam sidang tersebut wakil Belanda, Van Roijen mengucapkan suatu pidato yang brilian sekali untuk membela negerinya. Tetapi sebaliknya, wakil Indonesia Nico Palar menyampaikan juga pidato yang tak kalah briliannya untuk menuduh Belanda sebagai aggressor walaupun wakil Belanda membantah semua

¹¹² Purn R. H. A Hidayat, dkk, “*Indonesia Menyongsong Era Kebangkitan Nasional Kedua*”, (Jakarta: Yayasan Veteran RI, 1992), Hlm. 135.

¹¹³ *Ibid.*, Hlm. 9.

laporannya.¹¹⁴ Tetapi dengan adanya laporan tambahan dari Komisi Tiga Negara (KTN) tentang kondisi sebenarnya di Indonesia, akhirnya Dewan Keamanan PBB Lebih berpihak kepada Republik. Kejadian ini menyebabkan sikap Belanda melunak dan mau berunding kembali dengan pihak Republik Indonesia.

Pada tanggal 24 Desember 1948, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang isinya agar gencatan senjata segera dilaksanakan dan para pemimpin Republik Indonesia segera dibebaskan. Tetapi pihak Belanda tidak mau melaksanakan resolusi itu, akibatnya pada tanggal 20 Januari 1949 Dewan Keamanan mengeluarkan resolusinya yang lebih keras dan lebih terperinci sehingga terpaksa wakil Belanda menyerah tetapi tetap menghindarkan pelaksanaan resolusi itu. Melalui desakan Dewan Keamanan PBB, dukungan negara-negara Timur Tengah dan Konferensi New Delhi yang diadakan oleh Perdana Menteri Nehru akhirnya berhasil mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan antara ketua delegasi Indonesia, yaitu Mohammad Roem dengan wakil dari Kerajaan Belanda yaitu Van Roijen dibawah pengawasan UNCI di Hotel Des Indes, Jakarta pada 14 April 1949. Yang kemudian perundingan tersebut dikenal dengan perundingan Roem-Royen¹¹⁵.

Hasil dari perundingan itu sangat mencerminkan kemenangan diplomasi yang di jalankan oleh para Diplomat Indonesia, yaitu Belanda akhirnya mengembalikan Yogyakarta ketangan Indonesia serta membebaskan para pemimpin negara yang ditawan oleh Belanda seperti Soekarno, Mohamad Hatta, Haji Agus Salim, Sutan Syahrir, Mohamad Roem, Mr. A. G. Pringgodigdo, Mr. Asaat dan Suryadharma pada tanggal 6 Juli 1949. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 1949 lahir Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda.

¹¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 10.

¹¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 81-82.

Konferensi Meja Bundar ini diadakan atas usul pemerintah Belanda yang bertindak sebagai tuan rumah, sehingga jabatan ketua dipegang oleh seorang pembesar Belanda.¹¹⁶ Namun demikian wewenang komisi PBB untuk Indonesia tetaplah sama. Ia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bersangkutan agar tercapai kata sepakat. Disini jelas bahwa peran PBB dalam Konferensi Meja Bundar tidaklah pasif. Keberhasilan dalam KMB tentunya juga tak lepas dari peran PBB yang berusaha untuk ikut membantu penyelesaian masalah Indonesia dan Belanda. Alhasil, melalui perjanjian KMB, Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia. Usaha Haji Agus Salim untuk meminta dukungan PBB telah terbukti membuahkan hasil.

Selain dalam perundingan Linggarjati dan Renville, Haji Agus Salim juga ikut berjuang dalam Konferensi Meja Bundar mendampingi Mohamad Hatta yang ditunjuk sebagai ketua delegasi Indonesia. Konferensi Meja Bundar adalah konferensi segitiga antara delegasi Belanda, Republik Indonesia dan BFO. Sebelum Konferensi Meja Bundar berlangsung, diadakan pendekatan dan koordinasi dengan BFO terutama dalam hubungan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat maupun untuk menciptakan suatu front menghadapi Belanda. Perang gerilya oleh TNI dan rakyat yang sangat meningkat setelah Agresi militer Belanda II itu telah menyadarkan pemimpin-pemimpin BFO bahwa bagaimanapun Belanda tidak dapat berkuasa lagi di Indonesia.

Karena BFO dan Republik Indonesia telah bersatu maka Belanda kini hanya menghadapi delegasi Indonesia.¹¹⁷ Delegasi Indonesia dibawah pimpinan Mohamad Hatta berjuang dalam meja perundingan, hingga pada akhirnya melalui Konferensi Meja Bundar yang

¹¹⁶ Ide Anak Agung Gde Agung, “*Renville*”, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), Hlm. 287-289.

¹¹⁷ Mukayat, “*Haji Agus Salim: The Grand Old Man Of Indonesia*”, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981/1982), Hlm. 81.

diadakan di Den Haag, Belanda memberikan pengakuan kedaulatan kepada Indonesia. Dalam KMB ini Haji Agus Salim tetap menunjukkan sikapnya sebagai putra bangsa untuk selalu berjuang demi membela bangsa Indonesia. Meskipun fisiknya yang sudah lemah, namun jasa-jasa baiknya tetap dibutuhkan. Perundingan dengan Belanda sejak proklamasi kemerdekaan RI telah berperan besar dalam dunia diplomasi Republik Indonesia¹¹⁸. Hingga pada puncaknya Indonesia berhasil mendapat pengakuan dari Belanda dan dunia internasional.

¹¹⁸ Kustiniyati Mochtar, “*Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI: Kumpulan Karangan Mohamad Roem*”, (Jakarta: Gramedia, 1989), Hlm. 3.

C. Jabatan Haji Agus Salim pada Pemerintahan Republik Indonesia

Haji Agus Salim tak Cuma-Cuma memperoleh kedudukannya di masa kemerdekaan. Dia ikut berjuang membebaskan Hindia Belanda bahkan bekerja keras untuk itu. Pada masa setelah kemerdekaan Ia kembali menunjukkan eksistensinya dengan masuk dalam pemerintahan Republik Indonesia. Ketika terbentuk kabinet presidential dibawah pimpinan Presiden Sukarno, Agus Salim memang tidak duduk dalam kabinet tersebut. Dalam sistem kabinet presidential, fungsi dan kedudukan Presiden sangat sentral karena selain menjadi kepala negara ia juga menjadi kepala pemerintahan. Menyadari kedua peran itu membawa konsekuensi yang berat, maka UUD 1945 menyiapkan suatu lembaga yang akan memberikan berbagai pertimbangan yang obyektif dan bijaksana yang berdiri diluar kegiatan penyelenggaraan pemerintah.¹¹⁹ Lembaga tersebut kemudian dikenal dengan Dewan Pertimbangan Agung dimana dalam ketatanegaraan menurut UUD 1945 termasuk salah satu lembaga tinggi negara. Selain Dewan Pertimbangan Agung, lembaga-lembaga tertinggi lainnya yang sesuai dengan UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan wakil Presiden, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan¹²⁰.

Dewan Pertimbangan Agung merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk pada tanggal 25 September 1945. Susunannya ditentukan dengan undang-undang pasal 16 ayat 1 dan tugasnya menurut pasal 16 ayat 2 konstitusi sendiri adalah memberi jawab atas pertanyaan presiden dan berhak

¹¹⁹ Musthafa Kamal Pasha, "*Pancasila, UUD 1945 dan Mekanisme Pelaksanaannya*", (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 1988), Hlm. 131.

¹²⁰ Moh. Mahfud MD, "*Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*", (Yogyakarta: UII Press, 1993), Hlm. 119.

mengajukan usul kepada pemerintah¹²¹. Presiden mengangkat anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung yang berjumlah 11 orang, antara lain ialah: Radjiman Widyodiningrat, Syed Jamil Jambek, Haji Agus Salim, Wuryaningrat, H. Adnan, Margono Joyohadikusumo, Mohammad Enoch, Dr Latumeten, Ir. Pangeran Moh. Nur, Dr Sukiman Wiryoanjojo dan Ny. Suwarni Pringgodigdo¹²². Sebagai anggota Dewan pertimbangan Agung inilah karir pertama Haji Agus Salim dalam pemerintahan Republik Indonesia yang baru saja diproklamkan. Sebagai lembaga konstitusional tidak banyak yang dikerjakan oleh Dewan Pertimbangan Agung, terlebih ketika sistem pemerintahan berubah menjadi kabinet parlementer keberadaan Dewan Pertimbangan Agung menjadi tidak begitu berarti.

Jabatan dalam Dewan Pertimbangan Agung tidak lama ia emban, ketika kabinet Syahrir II terbentuk pada tanggal 12 Maret 1946 ia menempati posisi sebagai Menteri Muda Luar Negeri dan bertugas mendampingi Sutan Syahrir selaku Perdana Menteri yang merangkap pula sebagai Menteri Luar Negeri. Pada masa ini Agus Salim mulai berkecimpung secara aktif dalam bidang politik pemerintahan Republik Indonesia. Kedudukan Haji Agus Salim sebagai Menteri Muda Luar Negeri berlanjut hingga kabinet Syahrir III¹²³. Sehubungan dengan jabatannya sebagai Menteri Muda Luar Negeri, pada tanggal 23 Maret 1947 Agus Salim ditunjuk sebagai pimpinan delegasi Indonesia untuk menghadiri Konferensi Antar Asia (Inter Asian Relation Conference) yang diadakan di New Delhi, India. Kemudian Agus Salim beserta rombongan yang tergabung dalam misi diplomatik Indonesia melanjutkan

¹²¹ G. J. Wolhoff, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*", (Makassar: Timun Mas N.V, 1955), Hlm. 70.

¹²² Solichin Salam, "*Hadji Agus Salim: Hidup dan Perjuangannya*", (Jakarta: DjajaMurni, 1961), Hlm. 135-136.

¹²³ Mukayat, "*Haji Agus Salim: The Grand Old Man Of Indonesia*", (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1985), Hlm. 63.

perjalanan ke negara-negara Timur Tengah¹²⁴. Pada tanggal 30 Juni 1947, Presiden Sukarno menunjuk Amir Syarifuddin, Soekiman, A.K. Ghani dan Setiadji sebagai formatur kabinet koalisi yang akan menggantikan kabinet Syahrir III. Baru pada tanggal 3 Juli 1947 lahirlah kabinet Amir Syarifuddin I dan Haji Agus Salim menjabat sebagai Menteri Luar Negerinya¹²⁵. Setelah diadakan resuffle kabinet pada tanggal 11 November 1947, terbentuklah kabinet Amir Syarifuddin II dengan masuknya Masyumi dalam formasi kabinet. Selama dua kali periode pada kabinet Amir Syarifuddin I dan II, Haji Agus Salim berturut-turut menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.

Pada tanggal 9 Januari 1948, Agus Salim memangku jabatan Menteri Luar Negeri pada kabinet Hatta I. kabinet Hatta I adalah kabinet pengganti dari kabinet sebelumnya, yaitu kabinet Amir Syarifuddin. Setelah dilanda perang dan penculikan para petinggi negara yang dilakukan oleh Belanda, pada tanggal 4 Agustus 1949 diadakan resuffle kabinet dan kemudian diganti dengan kabinet Hatta II. Pada masa kabinet Hatta II ini, Haji Agus Salim masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri ikut menghadiri Konferensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda. Mengingat kemahirannya dalam hal berdiplomasi, Haji Agus Salim sering memegang peran dalam perundingan-perundingan, khususnya yang diadakan dengan pihak Belanda¹²⁶. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh pihak Belanda, Haji Agus Salim meletakkan jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri mengingat usianya yang semakin tua. Ketika terbentuknya kabinet Hatta III (kabinet RIS), Haji Agus Salim tidak lagi menduduki jabatan eksekutif lagi. Haji Agus Salim kemudian ditunjuk sebagai penasihat istimewa Mohammad Hatta pada kementerian luar negeri. Penunjukannya sebagai penasihat

¹²⁴ Panitia Buku Peringatan Seratus Tahun Haji Agus Salim, “*Seratus Tahun Haji Agus Salim*”, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), Hlm. 90.

¹²⁵ Mukayat, *op.cit.*, Hlm. 67.

¹²⁶ Mukayat, *op.cit.*, Hlm. 71.

Menteri Luar Negeri ini didasarkan pada banyaknya pengalaman yang telah didapatnya terutama pengalamannya semasa menjabat sebagai Menteri Muda Luar Negeri maupun Menteri Luar Negeri pada pemerintahan Indonesia. Prestasi-prestasi yang pernah di raihinya, terutama keberhasilannya untuk membawa bangsa Indonesia ke dunia internasional juga menjadi salah satu pertimbangan. Dengan berkaca pada banyaknya pengalaman Haji Agus Salim ini, maka tidak ada keraguan lagi ketika menunjuknya sebagai penasihat Menteri Luar Negeri¹²⁷.

¹²⁷ Farida Dwi Handayani, Ringkasan Skripsi: “*Peranan K. H. Agus Salim Dalam Kancah Perpolitikan Indonesia Masa Revolusi Fisik 1945-1950*”, (Yogyakarta: UNY, 2012), Hlm. 13.

